

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Miki Indika *
Suci Ramadhani †

ABSTRACT

This study aims to see whether the government internal control system partially influences the effectiveness of regional financial management, whether human resources partially influence the effectiveness of regional financial management, and simultaneously government internal control system and human resource competencies influence the effectiveness of regional financial management. This study aims to examine the effect of the government's internal control system and human resource competence on the effectiveness of regional financial management. There are three variables in this study, namely the government internal control system, human resource competency, and the effectiveness of regional financial management which entirely developed into 15 indicators. The sampling technique used is purposive sampling with a population of 12 (twelve) Regional Apparatus Organizations that implement the Government's Internal Control System where each Regional Device Organization is taken as many as twelve respondents. The data collection techniques are questionnaires and observations. The data analysis method used in the study is a multiple regression analysis with the help of SPSS version 20. The result indicates that Government internal control system partially had a significant effect on the effectiveness of regional financial management, the human resource competencies partially had a significant effect on the effectiveness of regional financial management.

Keywords: *Government Internal Control System, Human Resource Competence, Regional Financial Management Effectiveness*

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam hubungannya dengan daerah, masalah reformasi pengelolaan keuangan daerah sangat berkaitan erat dengan perubahan tata cara dan perangkat pengelolaan

* miki_indika@yahoo.com, Universitas Musi Rawas

† sucir2986@gmail.com, Universitas Musi Rawas

keuangan daerah, serta perubahan sumber penerimaan keuangan daerah. Ini maksudnya reformasi pengelolaan keuangan daerah bukan hanya fokus pada kreatifitas daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, melainkan juga pada perbaikan perangkat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Indonesia merupakan negara Pancasila sosialis yang menjadikan sektor publik sebagai salah satu sektor penting negara. Bagian terpenting dalam sektor publik ialah penerapan otonomi daerah yang memungkinkan suatu daerah untuk menjadi lebih aktif dan mandiri dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Pekei (2016), implementasi otonomi daerah dalam pelaksanaan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber–sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat dan daerah sebagai konsekuensi pembagian kewenangan untuk mengatur pengelolaan keuangan dengan administrasi tersebut dengan baik sesuai peraturan perundang–undangan.

Definisi pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah mengacu pada tujuan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah, maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki pengendalian untuk meningkatkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. SPIP adalah proses yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (*operating*), keandalan pelaporan (*financing reporting*), pengamanan aset negara (*safeguarding*), dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*). SPIP mengacu pada *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission or COSO* (2013) yang membagi SPIP ke dalam lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), penilaian risiko (*risk assessment*), informasi dan komunikasi, dan pemantauan (*monitoring*).

Menurut Mahmudi (2013, p.251), SPIP merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Lemahnya sistem pengendalian internal di antaranya disebabkan terjadinya berbagai kasus korupsi terhadap keuangan negara, pemborosan anggaran, ketidakefisienan organisasi, dan juga kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk. Organisasi yang semakin besar dan kompleks serta perkembangan pesat teknologi informasi yang pada satu sisi memberikan keuntungan, tetapi pada sisi yang lain juga meningkatkan risiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal.

Beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan karena pemerintah daerah belum melakukan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Karena itu, diperlukan pengelola keuangan yang kompeten di bidang keuangan. Sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya merupakan sumber utama yang menjadi keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Persoalannya adalah kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi, tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan sebuah pekerjaan. Dalam kenyataannya, ada organisasi yang cukup beruntung karena mengelola sumber daya manusia yang

kompeten dengan pengetahuan, keterampilan, sikap mental dan sosial yang sangat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, tetapi banyak pula organisasi yang berada dalam kondisi sebaliknya.

Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan sehingga target organisasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pun akan tercapai. Dalam instansi pemerintahan, untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasi pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor 35.B/LHP/XV3.PLG/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern. Pokok-pokok kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan persediaan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah belum dilaksanakan secara memadai.
2. Pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara belum tertib.
3. Pengelolaan pajak penerangan jalan non- PLN dan pajak air tanah belum memadai.
4. Penatausahaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada dinas pendidikan belum tertib.
5. Penatausahaan dan pengelolaan dana kapitasi dan nonkapitasi jaminan kesehatan

nasional belum tertib.

6. Pertanggungjawaban belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak tertib.
7. Belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga ketika di anggarkan tidak tepat.
8. Belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah tidak sesuai ketentuan.

Kelemahan yang terjadi pada sistem pengendalian intern umumnya disebabkan oleh pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak mematuhi ketentuan dan prosedur yang ada, belum teliti dalam melakukan perencanaan, dan masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian. Kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern (SPI) dapat saja berpotensi mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, pemborosan, serta tidak efisien dan efektif.

Hal-hal yang menjadi perhatian adalah kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah daerah yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu pendidikan dan pelatihan. Unsur kompetensi pendidikan dan pelatihan ini diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman / penguasaan aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat terlihat permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh SPIP dan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk memperbaiki Efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun formulasi judul penelitian ini adalah “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara”.

Identifikasi Masalah

1. Apakah secara parsial sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh pada

- Efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
 3. Apakah secara bersama–sama (simultan) sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

2. TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan ataupun seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tahun 2008 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Lima Elemen Sistem Pengendalian Intern sesuai PP No.60 Tahun 2008 meliputi

1. lingkungan pengendalian,
2. penilaian risiko,
3. kegiatan pengendalian,
4. informasi dan komunikasi, dan
5. pemantauan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian Kompetensi

Menurut Sutrisno (2016), kompetensi merupakan suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu.

Karakteristik Kompetensi

Sutrisno (2016) mengungkapkan terdapat lima aspek karakteristik kompetensi:

1. pengetahuan (*knowledge*),
2. kemampuan (*skill*),
3. konsep diri (*self-concept*),
4. ciri diri (*trait*), dan
5. motif.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi (2013), Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (*target*) dan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Prinsip–Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Pekei (2016), ada beberapa prinsip yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, yaitu

1. tanggung jawab,
2. mampu memenuhi kewajiban keuangan,
3. kejujuran,
4. hasil guna dan daya guna, dan
5. pengendalian.

Hipotesis

1. H_0 = sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial tidak berpengaruh pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
 H_a = sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial berpengaruh pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. H_0 = kompetensi sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
 H_a = kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
3. H_0 = sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya

manusia secara simultan tidak berpengaruh pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

H_a = sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dua belas Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah menerapkan SPIP.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel berjumlah 48 orang. Dari 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara diambil responden sebanyak empat orang yang nantinya akan memberikan tanggapan atas kuesioner yang diberikan.

Tabel 3.1

Daftar Sampel

No	Nama Dinas/Badan	Jumlah
1	Inspektorat	4
2	Badan Keuangan Daerah	4
3	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	4
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4
5	Dinas Sosial	4
6	Dinas Pendidikan	4
7	Dinas Kesehatan	4
8	Dinas Pertanian dan Perikanan	4
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	4
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	4
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
12	Satuan Polisi Pamong Praja	4
Jumlah Sampel		48

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan observasi.

Analisis Data dan Teknik Analisis Teknik analisis data dalam penelitian

kuantitatif menggunakan statistik sebagai berikut.

1) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat simpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Uji statistik deskriptif dilakukan dengan *software* SPSS versi 20.

2) Uji kualitas data

Pengujian kualitas data dilakukan dengan cara menghitung tingkat keandalan (*reliability*) dan tingkat keabsahan (*validity*) dengan menggunakan *software* aplikasi SPSS versi 20.

a. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui keyakinan dari masing-masing komponen dalam suatu daftar pertanyaan dalam mengartikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini umumnya mendukung kelompok variabel tertentu.

Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap poin pertanyaan di uji validitasnya. Dari Hasil r hitung maka akan di bandingkan dengan r table, nilai $df=n-2$ dengan tingkat signifikan 5%. Jika r tabel $<$ r hitung maka valid.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas (keandalan) untuk menilai suatu konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan poin pertanyaan yang merupakan gambaran suatu variabel Uji reliabilitas dapat juga dilakukan bersama-sama terhadap seluruh poin pertanyaan jika nilai $\alpha > 0,60$ maka reliabel.

3) Teknik Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Uji asumsi klasik multikolinearitas diterapkan untuk mengukur keeratan hubungan antar variable bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antarvariabel bebas (X_1 dan X_2 , X_2 dan X_3 dan seterusnya) lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien

korelasi antarvariabel bebas lebih kecil atau 0,60 ($r \leq 0,60$). Dalam penelitian ini variabel bebasnya (X_1 = sistem pengendalian intern pemerintah) dan (X_2 = kompetensi sumber daya manusia).

b. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi linear berganda juga perlu dilakukan uji mengenai persamaan atau perbedaan residual dari satu observasi dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.

Uji asumsi klasik heteroskedastisitas hasil olah SPSS melalui grafik *scatterplot* antara *Z prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel independen (Sumbu Y = Y prediksi – Y r2l).

Homoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* terdapat titik-titik dari hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID tersebar di bawah ataupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi jika pola *scatterplot* titik-titiknya menghasilkan pola yang teratur baik kecil, melebar ataupun bergelombang-gelombang.

c. Uji Asumsi Klasik Normalitas

Uji asumsi normalitas menguji data variabel bebas (X) terhadap data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dan residual pada periode sebelumnya (t-1). Metode pengujian yang biasanya digunakan oleh penulis sebelumnya adalah uji Durbin-Watson (uji DW). Pengambilan putusan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut:

1. $du < dw < 4$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi;

2. $dw < dl$ atau $dw > 4 - dl$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi;
3. $dl < dw < dl$ atau $4 - du < dw < 4 - dl$, artinya tidak ada kepastian atau simpulan yang pasti.

4) Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda, yaitu dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y= Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi X_1 b_2 = Koefisien regresi X_2

X_1 = Sistem pengendalian intern pemerintah

X_2 = Kompetensi sumber daya manusia

e = Kesalahan pengganggu (*error*)

Pengujian Hipotesis

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Duwi (2016), analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti menjelaskan kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016), untuk mencari koefisien determinasi, digunakan rumus

$$KD = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial)

Menurut Sugiyono (2016), uji T pada regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel

dependen. Rumus t yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = Nilai korelasi

n = Jumlah sampel

Uji T pada tingkat kepercayaan atau kebenaran 95% atau signifikan 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 = 0$ tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing–masing variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat (Y).

$H_a \neq 0$ ada pengaruh yang signifikan dan masing–masing variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat (Y).

Besarnya nilai dikatakan signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Untuk dapat melihat penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut kuat atau rendah, dapat berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Rendah
0,60 – 0,799	Sedang Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2016)

Uji F (uji koefisien regresi secara bersama–sama)

Menurut Sugiyono (2016, p.234), uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama–sama berpengaruh pada variabel dependen atau tidak. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada badan keuangan daerah Kabupaten

Musi Rawas Utara. Dalam pengujian F ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$F \text{ Hitung} = \frac{\frac{R^2}{k}}{(1 - R^2)/n - k - 1}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah anggota sampel

Untuk mengetahui besar nilai yang diperoleh, dengan ketentuan pengujian uji F, sebagai berikut:

$H_0 = 0$, menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

$H_a \neq 0$, menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara simultan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Besarnya nilai dikatakan signifikan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ hal ini berarti H_0 ditolak H_a diterima dan sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov Smirnov*. Hasil data dikatakan normal jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan signifikansi ($>0,05$). Hasil dapat dilihat di Tabel 4.1.

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.1 Output *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas untuk menganalisisnya dapat dilihat nilai signifikan *Asymp.Sig. (2-tailed)* untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah dengan nilai 0,711, kemudian kompetensi sumber daya manusia dengan nilai 0,645, sedangkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai 0,178, karena signifikan

untuk ketiga variabel semuanya menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan ketiga variabel tersebut distribusi datanya normal.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Total SPIP	Total Kompetensi SDM	Total Efektivitas PKD
N		48	48	48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	58	36,33	36,21
	Std. Deviation	5,745	3,392	2,888
Most Extreme Differences	Absolute	,101	,107	,159
	Positive	,066	,068	,075
	Negative	-,101	-,107	-,159
Kolmogorov-Smirnov Z		,700	,739	1,100
Asymp. Sig. (2-tailed)		,711	,645	,178

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer diolah 2019, SPSS.20

Hasil Uji Multikolinieritas

Dari uji ini ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen pada model regresi menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat digunakan nilai dari *Value Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai VIF < 10 tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

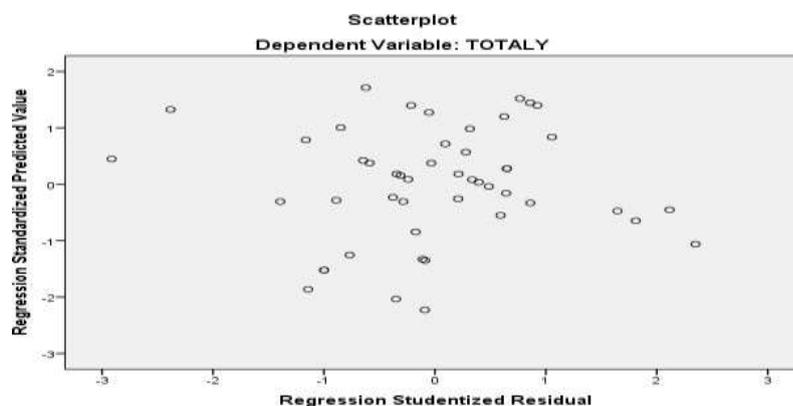
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant) SPIP		
1 Kompetensi SDM	,507	1,971
	,507	1,971

Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20

Tabel 4.2 menunjukkan hasil multikolinearitas dengan nilai VIF 1,971 untuk masing–masing prediktor di bawah atau < 10 . Nilai VIF tersebut berkisar 1–10 berarti tidak terjadi multikolinearitas; jadi dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas terpenuhi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas. Jika variannya tidak sama atau berbeda, disebut terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain, cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED; sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ riil}$) di-*standardized*. Uji heteroskedastisitas menghasilkan grafik pola penyebaran titik (*scatterplot*) seperti pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar. 4. 1 Diagram Scatterplot

Berdasarkan hasil pengujian Heteroskedastisitas pada Gambar 4.1, tidak adanya pola tertentu dalam grafik *scatterplot*, kondisi bawah atau atas nol pada sumbu Y, sehingga diambil simpulan bahwa model regresi dinyatakan layak untuk digunakan karena tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi

antara residual pada periode t dan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	,785 ^a	,616	,599	1,828	,616	36,115	2	45	,000	1,746

a. Predictors: (Constant), TOTALX2,TOTALX1

b. Dependent Variable:TOTALLY

Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20

Berdasarkan Tabel 4. 3, nilai Durbin Watson sebesar 1,746, nilai signifikan 5%. Jumlah sampel 48, dan jumlah variabel independen 2 ($k=2$), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai d_u sebesar 1,623 dan d_l sebesar 1,450. Karena nilai $d_u < dw < d_l = 1,623 < 1,746 < 1,450$ maka H_0 diterima. Jadi, disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Regresi

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda yang berasal dari dua variabel bebas, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Hasil dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari hasil uji regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi, yaitu $Y = 10,476 + 0,166 X_1 + 0,440 X_2$.

Dari persamaan nilai regresi terlihat bahwa nilai konstanta yang diperoleh adalah $a = 10,476$. Hal ini menunjukkan tanpa dipengaruhi variabel bebas sistem pengendalian intern pemerintah (x_1) dan kompetensi sumber daya manusia (x_2) nilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah 10,476 satuan.

Tabel 4.4
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	10,476	3,041	
1 SPIP	,166	,065	,331
KKompetensi SDM	,440	,110	,517

Sumber : Data rimer diolah 2019, SPSS.20

Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diperoleh adalah $b_1 = 0,166$ satuan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 1 satuan, nilai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah bertambah sebesar 0,166 satuan dengan asumsi variable bebas lainnya konstan.

Nilai koefisien variabel kompetensi sumber daya manusia yang diperoleh adalah $b_2 = 0,440$ satuan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 satuan, maka nilai Efektivitas pengelolaan keuangan daerah bertambah sebesar 0,440 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Dari hasil persamaan regresi di atas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa variabel yang lebih berpengaruh pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah variabel kompetensi sumber daya manusia karena memperoleh nilai 0,440 satuan, lebih besar daripada variabel sistem pengendalian intern pemerintah yang memperoleh nilai 0,166 satuan.

Hasil uji koefisien korelasi(r)

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi (r)
Correlations

	Total Efektivitas PKD	Total SPIP	Total Kompetensi SDM
Total Efektivitas PKD	1,000	,693	,749
Pearson Correlation Total SPIP	,693	1,000	,702
Total Kompetensi SDM	,749	,702	1,000

Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20

Tabel 4.5 menunjukkan hasil koefisien korelasi (r) variabel bebas sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) yang diperoleh adalah 0,693. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel bebas sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) dan variabel terikat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) secara parsial dapat dikatakan kuat, yaitu 0,693 karena nilai berada di interval koefisien 0,60 – 0,7999.

Selanjutnya, Tabel 4.5 juga menunjukkan hasil uji koefisien korelasi (r) variabel bebas kompetensi sumber daya manusia (X_2) yang diperoleh adalah 0,749. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel bebas kompetensi sumber daya manusia (X_2) dan variabel terikat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) secara parsial dapat dikatakan kuat, yaitu sebesar 0,749 karena nilai berada di interval koefisien 0,60 – 0,799.

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (r^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,785 ^a	,616	,599	1,828

Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20

Tabel 4.6 menunjukkan nilai koefisien determinasi atau *R Square* (R^2) yang diperoleh adalah 0,616, artinya Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dijelaskan oleh seluruh variabel bebas, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) dan kompetensi sumber daya manusia (X_2) secara simultan sebesar 61,6%. Sisanya sebesar 38,4% dipengaruhi oleh variabel–variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

b. Hasil Uji t (parsial)

Hasil uji T secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang diperoleh dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji T (Pasial)

	Model	t	Sig.	Taraf signifikan (5%)
	(Constant)	3,445	,001	0,05
1	Total SPIP	2,551	,014	0,05
	Total Kompetensi SDM	3,985	,000	0,05

Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20

Hasil uji T pada Tabel 4.7 menunjukkan variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) memperoleh nilai $t_{hitung} = 2,551$ lebih besar daripada nilai $t_{tabel(48-2=46)} = 2,013$ dengan nilai signifikan 0,014 lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05. Ini berarti secara parsial variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hasil uji T tabel di atas menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia (X_2) terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) memperoleh nilai $t_{hitung} = 3,985$ lebih besar daripada nilai $t_{tabel(48-2=46)} = 2,013$ dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05. Ini berarti secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

c. Hasil Uji F (Simultan)

Hasil dari uji F (simultan) variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) dan kompetensi sumber daya manusia (X_2) terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji F (Simultan) ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	241,474	2	120,737	36,115	,000 ^b
1	Residual	150,443	45	3,343		
	Total	391,917	47			

Sumber : Data primer diolah 2019, SPSS.20

Tabel 4.8 menunjukkan nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah $36,115 > F_{tabel(48-2-1) = 45} = 3,204$ dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan secara simultan variabel bebas penelitian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penelitian ini dijelaskan simpulan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) secara parsial terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan hasil uji t nilai $t_{hitung} > t_{tabel (48-2=46)}$ ($t_{hitung} 2,551 > t_{tabel} 2,013$) dengan nilai signifikan 0,014 lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (X_2) secara parsial berpengaruh pada Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan hasil uji t nilai $t_{hitung} > t_{tabel (48-2=46)}$ ($t_{hitung} 3,985 > t_{tabel} 2,013$) dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Pengaruh variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) dan kompetensi sumber daya manusia (X_2) secara bersama simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel (48-2-1=45)}$ ($F_{hitung} 36,115 > F_{tabel} 3,204$) dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05 $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Saran

Saran yang diberikan sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara agar penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan dapat menempatkan pegawai pada posisi atau bidang tugas yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut sehingga dapat memahami dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel yang berpengaruh kuat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti metode wawancara, survei, dan dokumentasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara*
- Mahmudi. (2013). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: U2 Press.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan analisis Efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sugiyono. (2016). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Prenada media Group.